

---

**BERPENGARUHKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN  
KEUANGAN?**

Oleh

Elva Dona<sup>1)</sup>, Genta Gautama<sup>2)</sup>, Irwan Muslim<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Akademi Keuangan Dan Perbankan

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

<sup>3</sup>Universitas Bung Hatta

E-mail: [1elvadona79@gmail.com](mailto:1elvadona79@gmail.com), [2genthagautama16@gmail.com](mailto:2genthagautama16@gmail.com),  
[3irwanmuslim@gmail.com](mailto:3irwanmuslim@gmail.com)

**Abstract**

Financial reporting accountability is an obligation of the government to provide accountability for regional financial reports. The purpose of this study is to determine the effect of fiscal decentralization and local government performance on financial reporting accountability in 19 districts and cities of West Sumatra Province. The sample in this study were 19 regencies and cities of West Sumatra Province with the sampling technique of total sampling. The analytical method used is binary logistic regression method. Based on the hypothesis, the research results simultaneously show that fiscal decentralization and local government performance have a positive effect on financial reporting accountability. Partially that fiscal decentralization has a positive effect on financial reporting accountability, local government performance has no effect on financial reporting accountability.

**Keywords:** Fiscal Decentralization, Local Government Performance, Financial Reporting Accountability

**PENDAHULUAN**

Upaya pemerintah buat melaksanakan pemerataan dan berbagai pencapaian suatu tujuan pengelolaan keuangan ialah diberikan kebijakan kepada pemerintah daerah buat melaksanakan urusan pemerintah secara efektif agar tercapainya pemerataan di berbagai daerah, sehingga seluruh pelaksanaan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan sebagai bentuk menjalankan otonomi daerah dengan landasan prinsip akuntabilitas, Wicaksono, (2015). Revitalisasi yang tengah dicoba oleh pemerintah diharapkan nantinya bisa mengejar ketertinggalan teknologi yang terdapat disaat ini, Muhammad Rivandi, (2022). Akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban jika organisasi atau pemerintah daerah bisa memberi penjelasan kepada penduduk tentang kewajiban pemakaian dana. (Oktaviani et al., 2020). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan

pelaporan keuangan pemerintahnya. Idealnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Moisiu, 2013). Hasil dikeluarkan audit BPK terhadap berbagai pendapat dari pernyataan para profesional pemeriksa serta pemeriksa laporan keuangan, Afriyanti, (2015). Adanya pendapat yang menyampaikan jika laporan keuangan pemerintah yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Semakin bagus pendapat audit semakin bagus tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan, Suryanto, (2017). Namun, jika pendapat audit ini berupa WDP (Wajar Tanpa Pengecualian) berkategori tidak baik, kepercayaan penduduk pada pemerintah sebagai entitas pengelola kekayaan daerah belum 100% yakin dengan kinerjanya selama tahun anggaran berjalan (Muraiya & Nadirsyah, 2018).

Desentralisasi fiskal menambah pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan ini dipengaruhi desentralisasi fiskal perihal memberi kesempatan ke daerah buat membangun kemandirian agar bisa mendapatkan pendapatan. Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, mewujudkan kemandiriannya atas keuangan (fiskal) daerah telah terdesentralisasi, perihal Pemda menggunakan kekuasaan sebagai mengelola keuangan sebagai kepentingan masyarakat daerah (Muraiya & Nadirsyah, 2018). Semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka makin kecil kemungkinan Daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik (Fontanella et al., 2014).

Pencapaian keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah didukung oleh kinerja pemerintah yang dijalankan secara tertib dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, Saragih & Siregar, (2020). Kinerja pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan surplus/defisit maupun aktiva dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Kinerja pemerintah daerah melakukan berbagai perbaikan pembangunan ataupun kebutuhan lainnya, juga peningkatan atau penurunan pendapatan dari berbagai daerah. Pencapaian keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah di dukung oleh kinerja pemerintah dijalankan secara tertib serta bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan. Hal ini pada laporan keuangan pemerintah mempunyai akuntabilitas sangat baik (Oktaviani et al., 2020).

## LANDASAN TEORI

### Desentralisasi Fiskal

Menurut Sukirno, (2003) kebijakan fiskal adalah suatu prosedur pemerintah melakukan perubahan sistem pajak ataupun pembelanjaan sebagaimana mengatasi urusan-urusan ekonomi dihadapi. Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah daerah akan fungsi-fungsi publik atau bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Konsep desentralisasi fiskal dikenal dengan *money follow function* yang berarti bahwa pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan diikuti oleh pembagian wewenang dalam aspek penerimaan pendanaan (Zulyanto, 2012).

Menurut Syahrudin, (2006) Desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan dalam 3 cara yaitu : (i) Pelepasan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (dekonsentra); (ii) Pendelegasian wewenang; dan (iii) Pelimpahan wewenang (devolusi). Oleh karena itu, desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi oleh pembantu, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Dalam berbagai konsep tersebut perlu ditekankan satu poin bahwa varian definisi yang tercakup dalam tipe-tipe desentralisasi tersebut tidak semata menyoal pergeseran dan pengalihan kekuasaan atas urusan antar level pemerintah namun juga mencakup otoritas non-negara baik berupa partisipasi warga (desentralisasi demokratik/politik) maupun keterlibatan dan kemitraan dengan swasta (desentralisasi pasar/ekonomi). Tujuan sistem desentralisasi antara lain: 1) Mencegah pemusatan keuangan. 2) Usaha pendemokrasian pemerintah daerah, mengikutsertakan masyarakat buat kewajiban penyelenggaraan pemerintah. 3) Menyusun program sebagai perbaikannya sosial ekonomi buat tingkat lokal. Adapun rumus untuk menghitung desentralisasi fiskal ialah :

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Total Pendapatan	Rata-Rata Total Aset
<p><b>Kinerja Pemerintah Daerah</b></p> <p>Menurut Bastian, (2006) kinerja yaitu gambaran pada tingkat tercapainya melaksanakan program buat mewujudkan tujuan, visi serta misi organisasi, terutama buat perumusan gambaran strategis pada organisasi. Kinerja pemerintah daerah memiliki arti penting, tidak sebagai dari masyarakat, selaku pemilik kedaulatan serta memberikan selaku menyumbangkan dana, tapi harus dari pemerintah daerah selaku eksekutif, apalagi bagi DPRD yang fungsional memiliki kewajiban atas melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan.</p> <p>Menurut Suropto, (2011) makna kinerja pemerintahan daerah dibagi menjadi enam bagian, yakni: 1) menjadi umpan balik buat Kepala Daerah buat perbaikannya kinerja pemerintah daerah ke masa akan datang. 2) Menemu kembali SKPD untuk diberikan kontribusi besar dan kuranya SKPD untuk diberikan kontribusi sebagai proses tercapainya visi Kepala Daerah serta mengidentifikasi berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kurang berhasilnya setiap SKPD. 3) Bangkitnya motivasi kerja serta jajaran agar bekerja lebih produktif. 4) Merumuskan kembali kebijakkan, program atau kegiatan sebagaimana dinilai lebih efektif berikut penganggarannya serta metode/teknik pelaksanaan lebih efisien buat proses pencapaian visi. 5) Melalui laporan kinerja, pemerintah daerah menginformasikan keberhasilan / kegagalan secara jujur serta menjelaskan berbagai faktor kegagalan, baik itu masyarakat, para pemberi penyumbang, DPRD dan pemerintah tingkat di atasnya. 6) Meningkatkan tingkat kepercayaan buat penduduk, jika dana publik diyakinkan kepadanya, telah dipakai dengan baik sebagaimana amanat diberikan. Adapun rumus untuk menghitung kinerja pemerintah daerah ialah :</p> <p>Kinerja Pemerintah Daerah = <math>\frac{\text{Surplus (Pendapatan - Belanja)}}{\text{Total Aset}} \times 100\%</math></p>	<p><b>Akuntabilitas Pelaporan Keuangan</b></p> <p>Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban perihal integritas keuangan, pengungkapan serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban tersebut yakni laporan keuangan serta peraturan perundang-undangan sebagaimana mencakup penerimaan, penyimpanan serta pengeluaran kas dari instansi pemerintah, LAN, (2003). Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan diperoleh atas sumber-sumber dibutuhkan pada masyarakat. Artinya informasi terkait dalam keperluan publik secara langsung, diperoleh seorang diperlukan (Mardiasmo, 2002).</p> <p>Akuntabilitas efektif bergantung dalam akses publik pada laporan pertanggungjawaban ataupun laporan temuan bisa dibaca serta dipahami. Pada demokrasi terbuka, akses tersebut diberikan pada media, misalnya surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi serta <i>website</i> (internet) serta forum dalam memberi perhatian langsung atau peranan sebagai pendorong akuntabilitas pemerintah ke penduduk (Shende, Suresh dan Tony, 2004).</p> <p>Adapun rumus untuk menghitung akuntabilitas pelaporan keuangan ialah dengan opini audit yang diberikan oleh BPK memakai kategorik yaitu diberi nilai 1 untuk pemerintah daerah yang mendapat opini WTP (baik) dan diberi nilai 0 untuk pemerintah daerah yang mendapatkan opini WDP (buruk).</p> <p><b>Pengembangan Hipotesis</b></p> <p>Penelitian dari Fontanella et al., (2014) menyampaikan kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan daerah, mempunyai akuntabilitas pelaporan</p>

keuangan tertinggi ke opini audit sebagaimana baik. Sehingga desentralisasi fiskal umumnya mempengaruhi kemungkinan daerah mempunyai pelaporan keuangan tertinggi, khususnya dilihat pada aspek kemandirian daerah. Mudhofar & Tahar, (2016) mengatakan kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, hal tersebut kemandirian daerah yang tinggi, sehingga bisa membiayai belanja daerah dengan mandiri, maka daerah bisa memberikan pertanggungjawaban, melaporkan serta mengungkapkan semua aktivitasnya. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Purbasari & Bawono, (2017) yang mengatakan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagian besar belum bisa mengembangkan PAD, sehingga masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis ke-1 yakni :

$H_1$  : Desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

Penelitian dimukakahkan oleh Fontanella et al., (2014) mengatakan jika semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, semakin tinggi dimungkinkan daerah mempunyai akuntabilitas pelaporan keuangan tertinggi pada bentuk opini audit sebagaimana baik. Penyelenggaraan kinerja baik mencerminkan adanya orientasi pemda untuk menuju kepada *good government*. Berarti, semakin baik kinerja pemerintah, maka semakin baik kualitas pelaporan keuangan serta akuntabilitas pemda (Mudhofar & Tahar, 2016).

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan, Berarti dalam pemberian opini BPK tidak melihat pada hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi juga berdasarkan LKJP dan LAKIP, jadi kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Purbasari & Bawono, 2017). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Oktaviani

et al., 2020), mengatakan kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, memberikan makna yaitu kinerja pemerintah mempunyai hubungan searah dengan akuntabilitas pelaporan, artinya semakin tinggi kinerja pemerintah maka akuntabilitas pelaporan keuangan semakin meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis ke-2 yakni:

$H_2$ : Kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

Berdasarkan hipotesis-hipotesis sebelumnya di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

$H_3$ : Desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

## METODE

### Data dan Sampel

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menurut, Sugiyono, (2017) metode kuantitatif adalah penelitian yang bergantung pada filsafat positivisme dilakukan untuk memeriksa sebuah populasi dan sampel pada waktu tertentu. Penelitian menggunakan data panel karena data yang peneliti kumpulkan terdiri atas beberapa objek dalam beberapa periode tertentu, yaitu berupa data laporan keuangan daerah.

Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling dengan teknik pengambilan sampel yaitu total *Sampling* yang didasarkan mengambil semua populasi dan dijadikan sampel dalam penelitian dengan jumlah populasi sebanyak 19 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020.

### Definisi Operasional Variabel

Variabel *dependent* pada penelitian ini adalah akuntabilitas pelaporan keuangan sedangkan variabel *independent*nya yaitu desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah.

Berikut disajikan definisi operasional dalam penelitian ini:

**Tabel 1 Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Pengukuran
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Akuntabilitas pelaporan keuangan pertanggung-jelasan pemerintah ke publik jika keuangan pemerintah dikelola sebagai tanggung jawab buat tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk sebagaimana membentaha informasi atau jawaban yang jelas ke publik, perihal aktivitas pemerintah sebagaimana diwujudkan melalui laporan keuangan.	Akuntabilitas pelaporan keuangan diukur dari opini audit menjadi kategori: yaitu diberi nilai 1 untuk pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP (baik) dan diberi nilai 0 untuk pemerintah daerah yang mendapatkan WDP (buruk). (Oktariani et al., 2020)
Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi fiskal yakni wewenang serta tanggung jawab ke pemerintah pusat pada pemerintah daerah, sebagai fungsi publik atau tujuan dalam peningkatan ter-sejahteranya masyarakat.	Kemandirian Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan}}$ (Mulya & Nadiyah, 2018)
Kinerja Pemerintah Daerah	Kinerja pemerintah daerah wajib buat pemerintah daerah, selaku eksekutif, lebih bagi DPRD secara fungsional melaksanakan kewyaban atau terlaksananya fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pemerintahan.	Kinerja Pemerintah = $\frac{\text{Sumbu (Pendapatan - Belanja)} \times 100\%}{\text{Rata-Rata Total Aset}}$ (Oktariani et al., 2020)

**Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Analisis Statistik Deskriptif**

Data yang diolah dan dikumpulkan dalam penelitian, kemudian dianalisis menggunakan alat statistik yang disebut dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

**Regresi Logistik**

Analisis regresi logistik adalah analisis regresi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara sebuah variabel terikat kategorik untuk yang bertipe biner dengan variabel bebas yang bertipe kategorik maupun numerik. Perubahan respon biner tersebut biasanya diklasifikasikan dengan sukses atau gagal dan juga bisa ditulis dengan dua nilai yaitu Y =1 dan Y =0, sebagai contoh sembuh/tidak, hidup/mati, lulus/tidak lulus, baik/buruk dan lain-lain.

Model regresi logistik *binary* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\ln \frac{Y_{it}}{1-Y_{it}} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon$$

Atau bisa juga dengan :

$$\pi_i = E(Y_{it} = 1 | x_{it}) = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{2it})}}$$

Keterangan :

- $\ln \frac{Y_{it}}{1-Y_{it}}$  : Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah i pada waktu t
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta$  : Koefisien regresi
- $X_{it}$  : Kemandirian Daerah i pada waktu t
- $X_{2it}$  : Kinerja Pemerintah Daerah i pada waktu t
- $\varepsilon$  : Variabel pengganggu (*Residual Error*)

**Pengujian Signifikan Model Dengan Simultan**

*Omnibus tests of model coefficients* merupakan uji statistik secara simultan (uji f). Dalam penelitian ini akan menguji apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun tingkat signifikansinya sebesar 5%, sehingga kriteria penagmbilan keputusan sebagai berikut: 1) Jika  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dan  $(P-Value) < 0,005$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. 2) Jika  $f_{hitung} < f_{tabel}$  dan  $(P-Value) > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi vaeriabel dependen.

**Pengujian Signifikan Mode Secara Parsial**

Uji-Wald digunakan untuk menguji tiap-tiap parameter. Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 = \beta_i = 0$$

$$H_1 = \beta_i \neq 0$$

Dengan  $i = 1,2,3,\dots,k$ .

Statistik uji-wald adalah

$$W_i = \left[ \frac{\hat{\beta}_i}{SE(\hat{\beta}_i)} \right]^2$$

Untuk  $i = 0,1,2,\dots,k$ , dimana

Dimana  $\hat{\beta}_i$  merupakan penduga dan  $SE(\hat{\beta}_i)$  merupakan penduga galat baku

dari  $\beta_i$ .  $H_0$  ditolak jika  $W_i > \chi^2_{a,k}$ ; dengan  $a$  tingkat signifikansi yang dipilih.

### Menguji Kelayakan Model Regresi

Analisis ini dinilai menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Terdapat sebuah uji yang sering digunakan untuk menilai kesesuaian data dengan model regresi logistik yang terbentuk, yaitu uji *Hosmer Lemeshow*. Hipotesis yang diuji adalah:

$H_0$  : model sesuai dengan data

$H_1$  : model tidak sesuai dengan data

Statistik uji yang digunakan pada pengujian ini didasarkan pada nilai *khi* kuadrat *Pearson*. Statistik uji ini diperoleh dengan terlebih dahulu mengurutkan pengamatan berdasarkan nilai peluang yang diperoleh, kemudian membagi pengamatan yang terurut tersebut ke dalam  $g$  kelompok (biasanya  $g=10$ ). Selanjutnya, statistik uji didefinisikan sebagai :

$$H = \sum_{g=1}^G \frac{(Og - ng\bar{\pi}g)}{ng\bar{\pi}g(1 - \bar{\pi}g)}$$

$H_0$  akan ditolak jika nilai  $H > \chi^2_{g-2}$  atau jika sig <  $a$ .

### Menilai Keseluruhan Model

#### 1. Menilai Model *Fit*

Uji serempak dilakukan dengan menggunakan uji-G atau disebut juga uji rasio kemungkinan (*likelihood ratio test*). Uji ini digunakan untuk menguji peranan peubah penjelas didalam model secara bersama-sama, berdasarkan hipotesis :

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$H_1$  = paling sedikit ada satu  $\beta_i \neq 0$  dengan  $i = 1, 2, 3, \dots, k$

Statistik uji yang digunakan pada pengujian ini adalah

$$G = -2 \ln \left[ \frac{L_0}{LM} \right] = -2[\ln L_0 - \ln LM]$$

Dimana  $L_0$  adalah likelihood dari model yang hanya mengandung konstanta saja dan  $LM$  adalah likelihood dari model yang mengandung variabel.  $H_0$  ditolak jika  $G > \chi^2_{a,k}$ ;  $a$  adalah tingkat signifikansi, yang berarti bahwa model A signifikan pada tingkat signifikansi  $a$  yang berarti juga bahwa paling tidak satu variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

#### 2. Pengujian Koefisien Determinasi

Analisis regresi logistik tidak memiliki ukuran kebaikan model yang setara dengan yang diperoleh pada analisis regresi linier biasa. Namun terdapat beberapa ukuran  $R^2$  yang biasa dinamakan *pseudo R<sup>2</sup>*. Dua di antaranya adalah :

a)  $R^2$  *Cox & Snell* yang dirumuskan sebagai :

$$R^2_{CS} = 1 - \left[ \frac{L_0}{LM} \right]^{2/n}$$

Nilai  $R^2$  ini memiliki kendala utama, dimana nilai ini tidak pernah mencapai nilai 1 sebagaimana nilai  $R^2$  pada analisis regresi biasa.

b)  $R^2$  *Nagelkerke*; ukuran ini digunakan sebagai koreksi atas keterbatasan nilai  $R^2$  *cox & snell*. Koreksi tersebut dilakukan dengan membagi  $R^2_{CS}$  dengan batas atasnya.

Di beberapa pembahasan disebutkan, karena nilai  $R^2$  ini tidak dapat diinterpretasikan sebagaimana nilai  $R^2$  pada analisis regresi biasa, disarankan untuk menginterpretasikan nilai ini dengan sangat hati-hati.

#### 3. Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan tidak benar (*incorrect*). Pada kolom mempunyai dua nilai prediksi dari variabel dependen yaitu baik diberi 1 dan tidak baik diberi 0. Pada garis menunjukkan nilai observasinya yang sesungguhnya dari variabel dependen yaitu nilai baik 1 dan tidak baik 0.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menyampaikan acuan terhadap data-data di variabel penelitian yang dipakai dalam penelitian. Analisis deskriptif dipakai untuk menjelaskan seputar ringkasan sampel penelitian seperti maksimum, minimum, mean dan standar deviasi. Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilaksanakan oleh peneliti, diperoleh pengolahan data secara deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Std. Deviasi
Desentralisasi Fiskal	114	3,97	26,22	9,6090	4,253
Kinerja Pemerintahan Daerah	114	-6,49	5,10	-0,1656	2,268
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	114	0	1	0,91	0,284

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Berdasarkan tabel 2, Kabupaten/Kota yang dijadikan sampel adalah 19 Kabupaten/Kota dengan tahun pengamatan yang dijadikan sampel selama 6 tahun yaitu tahun 2015-2020, maka jumlah observasi yang dikumpulkan berjumlah 114 sampel data.

Desentralisasi fiskal yang diukur menunjukkan bahwa nilai minimum pada Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019 sebesar 3,97%, nilai maksimum pada Kota Padang tahun 2017 sebesar 26,22%, secara keseluruhan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 mempunyai nilai rata-rata sebesar 9,61% dengan tingkat standar deviasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 sebesar 4,25%.

Kinerja pemerintah daerah yang diukur menunjukkan bahwa nilai minimum pada Kota Bukittinggi tahun 2020 sebesar -6,49%, nilai maksimum pada Kabupaten Sijunjung tahun 2017 sebesar 5,10%, secara keseluruhan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 mempunyai nilai rata-rata sebesar -0,17% dengan tingkat standar deviasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 sebesar 2,29%.

Akuntabilitas pelaporan keuangan yang diukur menunjukkan bahwa nilai minimum pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 0, nilai maksimum pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 1, secara keseluruhan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,91 dengan tingkat standar deviasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020 sebesar 0,284.

## Menguji Kelayakan Model

Uji *Goodness of Fit* memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel bisa didekati menggunakan distribusi atau tidak. Dengan menggunakan program SPSS uji *Goodness of Fit* dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Goodness of Fit Test* yang dinilai berdasarkan angka *Chi-Square* di kolom *Hosmer and Lemeshow Test* hasil penelitian ini bisa dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3 Hasil Uji *Goodness Of Fit Hosmer and Lemeshow Test*

Step	Chi-square	df	Sig.
1	16,566	8	0,035

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* sebesar 16,566 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,035. Karna nilai *probability* signifikan (0,035) < tingkat signifikat (0,05), maka H1 diterima. Artinya model regresi ini tidak layak dipakai dalam analisis selanjutnya.

## Menilai Keseluruhan Model

### 1. Menilai Model *Fit*

Uji keseluruhan model dipakai untuk mengetahui model yang dihipotesiskan sudah fit atau tidak dengan data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara  $-2 \log \text{likelihood}$  pada awal (blok nomor= 0) dengan nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  pada akhir (blok nomor = 1). Nilai  $-2 \log \text{likelihood}$  awal pada blok nomor= 1, hasil penelitian bisa dilihat melalui tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4 Overall Model Fit Iteration History<sup>a,b,c</sup>**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	73,068
	2	67,980
	3	67,769
	4	67,768
	5	67,768

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Nilai -2 log *likelihood* akhir pada blok nomor= 1, bisa dilihat pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5 Overall Model Fit Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients		
		Constant	Desentralisasi Fiskal	Kinerja Pemerintah Daerah
Step 0	1	69,561	1,050	0,061
	2	59,989	0,656	0,169
	3	56,569	-0,397	0,330
	4	55,730	-1,183	0,454
	5	55,676	-1,417	0,493
	6	55,676	-1,434	0,496
	7	55,676	-1,434	0,496

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

**Tabel 6 Omnibus Tests of Model Coefficients**

Step	Chi-square	df	Sig.
Step 1	12,093	2	0,002
Block Model	12,093	2	0,002
	12,093	2	0,002

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Dari tabel 4.3 diatas, bisa dilihat bahwa -2 log *likelihood* awal pada blok nomor = 0, yaitu model yang memasukkan konstanta yang bisa dilihat pada step 5, memperoleh nilai sebesar 67,768. Kemudian pada tabel 4.4 bisa dilihat nilai -2 log *likelihood* akhir dengan blok nomor= 1, nilai -2 log *likelihood* pada step 5 memperoleh nilai sebesar 55,676. Adanya penurunan nilai antara -2 log *likelihood* awal dengan -2

log *likelihood* akhir, menunjukkan bahwa model yang dihipotesis fit pada sampel. Penurunan nilai -2 log *likelihood* menunjukkan bahwa model penelitian ini dinyatakan fit, artinya penambahan variabel bebas yaitu desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa model regresi lebih baik atau  $H_0$  diterima.

$$G = -2 \ln L_0 - (2 \ln L_M) = 67,768 - 55,676 = 12,092$$

Dari tabel 4.5 diatas omnibus tests, untuk nilai  $G = 12,092$  dan derajat bebas 2, diperoleh nilai sig tabel tersebut diperoleh nilai sig < 0,05, sehingga disimpulkan bahwa penambahan kedua variabel secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan model dalam melakukan pendugaan.

## 2. Pengujian Koefisien Determinasi

Dalam regresi logistik tidak memiliki ukuran kebaikan model yang setara dengan yang diperoleh pada analisis regresi linier biasa. Namun terdapat beberapa ukuran  $R^2$  yang biasa dinamakan *pseudo R<sup>2</sup>*, dua diantaranya yaitu *Cox* dan *Snell's R Square* dan  $R^2$  *Nagelkerke*. Perolehan penelitian bisa diketahui pada tabel 7 berikut:

**Tabel 7 Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	55,676 <sup>a</sup>	0,101	0,225

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diperoleh nilai *pseudo R<sup>2</sup>* dimana, nilai  $R^2$  *Cox* dan *snell's* adalah 0,101 (nilai ini tidak pernah mencapai 1) dan  $R^2$  *Nagelkerke* adalah 0,225 yang bermakna bahwa 22,5% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sisa sebesar 77,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian.



### 3. Tabel Klasifikasi

**Tabel 8 Classification Table<sup>a</sup>**

Observed	Predicted	Akuntabilitas Pelaporan Keuangan		Percentage Correct
		Buruk	Baik	
Step 1 Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	Buruk	0	10	0,0
	Baik	0	104	100,0
Overall Percentage				91,2

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah SPSS 26

Tabel klasifikasi digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar (*Correct*) dan tidak benar (*incorrect*). Berdasarkan tabel tersebut, tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk prediksi kemungkinan yang menerima opini WTP (Baik) ada 104 sampel, jadi ketetapan model ini adalah 91,2%.

#### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan model *logistic regression binary* dengan metode enter pada tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 5% *logistic regression binary* dipakai untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

#### 1. Regresi Logistik

Uji regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 26 sehingga diperoleh hasil pada tabel berikut ini :

**Tabel 9 Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step <sup>a</sup> Desentralisasi Fiskal	0,496	0,199	6,213	1	0,013	1,642	1,112	2,425
Kinerja Pemerintah Daerah	-0,206	0,162	1,627	1	0,202	0,813	0,592	1,117
Constant	-1,434	1,374	1,089	1	0,297	0,238		

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah Dengan SPSS 26

Pada tabel diatas dapat dilihat dalam bentuk persamaan dibawah ini :

$$In (Yit/1-Yit) = -1,434 - 0,496 Dfit - 0,206 KPDit$$

Jika dalam sebuah pengamatan, nilai  $Yit < 0,5$ , maka diduga pengamatan tersebut buruk (wajar dengan pengecualian) terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dan sebaliknya, jika  $Yit > 0,5$ , maka diduga pengamatan tersebut baik (wajar tanpa pengecualian) terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Nilai odds ratio (OR) dari masing-masing variabel dapat diketahui dari nilai  $\exp(B)$ . Interpretasi terhadap odds ratio yang diperoleh untuk data tersebut antara lain: 1) Untuk variabel Desentralisasi Fiskal diperoleh OR = 1,642 menunjukkan bahwa semakin tinggi peningkatan desentralisasi fiskal maka semakin baik (WTP) akuntabilitas pelaporan keuangan daerah tersebut. 2) Untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah diperoleh OR = 0,813 menunjukkan bahwa semakin bagus kinerja pemerintah daerah maka akan semakin baik (WTP) akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

#### 2. Pengujian Signifikan Model Dengan Simultan

*Omnibus tests of model coefficients* merupakan uji statistik secara simultan (uji f). Dalam penelitian ini akan menguji apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Hasil penelitian bisa diketahui pada tabel tabel 4.5 diatas sebagai rujukan bahwasanya diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,002. Karena nilai probabilitas ( $0,002 < \text{tingkat probability } 0,05$ ), maka disimpulkan bahwa variabel-variabel independen desentralisasi fiskal (X1) dan kinerja pemerintah daerah (X2) yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan (Y).

### 3. Pengujian Signifikan Model Dengan Parsial

Pada regresi logistik, uji signifikansi koefisien regresi populasi secara individu bisa diuji dengan uji wald. Uji wald statistik yang diuji adalah statistik *Wald (Wald Statistic)*, apabila nilai probabilitas (Sig) > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa independen tidak mempengaruhi variabel dependen, apabila nilai probabilitas (Sig) < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sehingga hipotesis yang dihasilkan pada tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa uji *Wald* menunjukkan hasil signifikansi atau pengaruh variabel-variabel X terhadap variabel Y sebagai berikut: 1) Variabel Desentralisasi Fiskal (X1) memiliki nilai probabilitas (Sig) 0,013 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y) pada 19 Kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat. 2) Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (X2) memiliki nilai probabilitas (Sig) 0,202 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y) pada 19 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada 19 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat mengembangkan pendapatan asli daerah dengan baik sehingga dapat membiayai pembangunan atau biaya lainnya dari hasil keuangan kemandirian daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fontanella et al., (2014), Mudhofar & Tahar, (2016), Muraiya & Nadirsyah, (2018) yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan daerah, karena akuntabilitas pelaporan keuangan mempunyai opini audit yang baik. Sehingga desentralisasi fiskal umumnya mempengaruhi kemungkinan daerah mempunyai pelaporan keuangan tertinggi, khususnya dilihat pada aspek kemandirian daerah.

Desentralisasi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi lokal untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperbaiki kemampuan untuk menanggapi kebutuhan dan kondisi lokal. Pemerintah daerah harus memperkuat tanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah. Idealnya, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

### Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada 19 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2020. Hasil menunjukkan bahwa masih kurangnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab laporan keuangan.

Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fontanella et al., (2014), Oktaviani et al., (2020) dan Mudhofar & Tahar, (2016) yaitu kinerja pemerintah mempunyai hubungan searah dengan akuntabilitas pelaporan keuangan, artinya semakin tinggi kinerja pemerintah maka akuntabilitas pelaporan keuangan semakin meningkat. Sehingga, kinerja pemerintah

daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Manajemen kinerja yang baik menggambarkan arah SKPD menuju tata kelola yang baik. Artinya semakin baik kinerja pemerintah daerah maka makin baik pula kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, bisa juga terkait dengan upaya menyampaikan pesan positif mengonfirmasikan kepada pemangku kepentingan bahwa pemerintah daerah berkinerja baik, agar dapat ditampilkan dalam bentuk pertanggung jawaban yang baik.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil dari penelitian pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Variabel desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Akuntabilitas pelaporan keuangan mempunyai opini audit yang baik, sehingga desentralisasi fiskal umumnya mempengaruhi kemungkinan daerah mempunyai pelaporan keuangan tertinggi, khususnya dilihat pada aspek kemandirian daerah. 2) Variabel kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan kurangnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab laporan keuangan.

### Saran

Adapun saran yang akan disampaikan berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk peneliti, dalam mencari data penelitian tidak hanya di satu sumber saja, tambahkan sumber lainnya. 2) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas data penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Afriyanti, D., H. G. Sabanu, dan F. N. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas

Instansi Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(2), 101–103.

- [2] Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- [3] Fontanella, A., Padang, P. N., & Rossieta, H. (2014). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- [4] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [5] LAN, L. A. N. (2003). *Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- [6] Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- [7] Moisiu, A. (2013). *Decentralizations and The Increased autonomy in Local Governments, Procedia-Social and Behavioral Sciences*. pp.459-463.
- [8] Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 176–185. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185>
- [9] Muhammad Rivandi, F. O. (2022). *Pengaruh Return on Asset Dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2020*. 2(10), 3539–3548.
- [10] Muraiya, & Nadirsyah. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

- Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 236–253.
- [11] Oktaviani, M. A., Sari, D. P., Akuntansi, P., Katolik, U., & Mandala, W. (2020). *Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan*. 21(1), 186–193.
- [12] Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 102–108. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4884>
- [13] Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 1–14.
- [14] Shende, Suresh dan Tony, B. (2004). *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- [15] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [16] Sukirno, S. (2003). *Pengantar Teori Mikroekonomi Edisi Ketiga*. Grafindo.
- [17] Suripto, S. C. dan. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Fokus Media.
- [18] Suryanto. (2017). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.220>
- [19] Syahrudin. (2006). *Desentralisasi Fiskal : Perlu Penyempurnaan Kebijakan Dan Implementasi Yang Konsisten*. Universitas Andalas.
- [20] Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- [21] Zulyanto, A. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24036/ecosains.346557.00>